

DINAMIKA

HUKUM

INVESTASI

DI INDONESIA

Dr. Elli Ruslina, S.H., M.Hum



Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DINAMIKA HUKUM INVESTASI DI INDONESIA

Dr. Elli Ruslina, S.H., M.Hum

DINAMIKA HUKUM

INVESTASI DI INDONESIA

Penulis:

Dr. Elli Ruslina, S.H., M.Hum

Desain Cover:

Nur Muhamad Safi'i

Tata Letak:

Ida Farida
Komarudin

Editor:

Ida Farida
Nuradi
Ahmad Tarmidzi
Komarudin

ISBN:

978-634-7542-11-3

Hak Cipta 2025, Pada penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Greenbook Publishing Indonesia

All Right Reserved

**Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.**

Penerbit

Greenbook Publishing Indonesia

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 12, Kedungjaya, Kec. Kedawung
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *DINAMIKA HUKUM INVESTASI DI INDONESIA* ini dapat tersusun dan hadir di tengah para pembaca.

Penyusunan buku ini sebagai wadah bagi semua orang untuk mengembangkan daya kritis dan kemampuan analitis dalam memahami serta mengevaluasi dinamika hukum investasi yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun global. Isu-isu yang diangkat dalam bunga rampai ini sangat beragam, mulai dari persoalan regulasi penanaman modal, perlindungan terhadap investor, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga aspek keberlanjutan dalam kebijakan investasi.

Sebagai negara yang tengah mengokohkan fondasi perekonomian nasional dalam era globalisasi menjadikan investasi sebagai salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi, Indonesia membutuhkan sistem hukum investasi yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Dalam kerangka inilah, hukum investasi tidak dapat dipisahkan dari visi konstitusional bangsa sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketentuan ini memberikan landasan normatif bahwa kebijakan investasi, baik asing maupun domestik, harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, hukum investasi harus berperan sebagai instrumen yang menyeimbangkan antara kebutuhan akan modal dan perlindungan terhadap kepentingan nasional, termasuk kedaulatan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial.

Melalui pemahaman ini, para mahasiswa diajak untuk tidak hanya melihat investasi dari sudut pandang teknokratis dan ekonomis, tetapi juga dari sudut pandang ideologis dan konstitusional. Dengan demikian, kajian yang mereka hasilkan dalam buku ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi akademik terhadap pembentukan sistem hukum investasi yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi ilmiah, inspirasi pemikiran, dan dorongan semangat untuk terus mengembangkan kajian hukum investasi yang kontekstual dan konstitusional.

Bandung, 14 Agustus 2025
Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Investasi,

Elli Ruslina

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 INVESTASI HIJAU: REGULASI DAN IMPLIKASINYA	1
DI INDONESIA.....	1
Abdul Aziz.....	1
A. INTEGRASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> DAN EKONOMI KERAKYATAN ...	2
B. KERANGKA REGULASI INVESTASI HIJAU DI INDONESIA: EVOLUSI DAN TRANSFORMASI PASCATERBITNYA UU CIPTA KERJA	4
C. IMPLEMENTASI INVESTASI HIJAU DALAM KONTEKS EKONOMI KERAKYATAN	6
D. TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU KEDAULATAN EKONOMI HIJAU	7
BAB 2 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM UU PENAMAAN MODAL DAN UU CIPTA KERJA	9
Agung Nugraha	9
A. PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL	10
B. EFEKTIVITAS REGULASI DAN PERAN LEMBAGA PENGAWAS DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM SERTA PERLINDUNGAN HAK-HAK INVESTOR DALAM PRAKTIK INVESTASI NASIONAL	14
BAB 3 MELINDUNGI INVESTOR DI ERA KRIPTO	16
Ahmad Tarmidzi	16
A. ASET KRIPTO	17
B. EFEKTIVITAS HUKUM	23
BAB 4 KKPR SEBAGAI KATALIS INVESTASI HIJAU.....	24
Asep Handi	24
A. PENTINGNYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (NDC)	24
B. PERAN INVESTASI HIJAU UNTUK MENDUKUNG TRANSISI MENUJU PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	25

C. PENTINGNYA KKPR DALAM KONTEKS INVESTASI HIJAU	26
D. KERANGKA REGULASI KKPR UNTUK INVESTASI HIJAU	28
E. DASAR HUKUM DAN REGULASI TERKAIT KKPR	28
F. KETERLIBATAN OPERASIONAL KKPR DI JAWA	28
G. KETERSEDIAAN RDTR (RENCANA DETAIL TATA RUANG) TINGGI: MEMPERCEPAT AKSES PEMBIAYAAN HIJAU	29
H. KETERLIBATAN OPERASIONAL KKPR DI LUAR JAWA	30
BAB 5 KERANGKA HUKUM INVESTASI ASING DAN TANTANGANNYA.....	32
Awangga	32
A. PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK INVESTASI ASING DI INDONESIA 33	
B. PENYELESAIAN PERMASALAHAN MENGENAI HALANGAN DAN DINAMIKA SOSIAL DALAM IKLIM INVESTASI ASING DI INDONESIA 35	
C. PREMANISME DAN KEAMANAN INVESTASI	35
D. ASOSIASI BURUH DAN PENGARUH TERHADAP STABILITAS INDUSTRI	36
BAB 6 TANGGUNG JAWAB HUKUM INVESTOR TERHADAP <i>DUE DILIGENCE</i> LINGKUNGAN.....	38
Dirfas Laudza Kusuma.....	38
A. KAITAN <i>DUE DILIGENCE</i> DENGAN HUKUM INVESTASI DAN HUKUM LINGKUNGAN?	39
B. TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PENERAPAN ASPEK <i>DUE DILIGENCE</i> LINGKUNGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.....	42
BAB 7 REFORMASI HUKUM INVESTASI DI INDONESIA MENGHADAPI IKLIM INVESTASI ASEAN	44
Elvan Septian.....	44
A. HYPER REGULATION DAN JUGA REFORMASI REGULASI INVESTASI 48	
B. KONTROVERSI DAN LEGITIMASI OMNIBUSLAW DI NATION SISTEM HUKUM AKHIR.....	50

BAB 8 CERMIN TIGA DIMENSI: <i>ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE</i> (ESG) SEBAGAI REFLEKSI HUKUM, ETIKA, DAN EKONOMI	52
Ernni Rosinawati	52
A. ESG SEBAGAI INSTRUMEN REGULATIF	56
B. ESG SEBAGAI MANIFESTASI TANGGUNG JAWAB MORAL	57
C. ESG SEBAGAI STRATEGI INVESTASI DAN NILAI TAMBAH	58
D. MENUJU PARADIGMA INVESTASI YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	59
BAB 9 REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN INVESTOR DALAM INVESTASI BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL (<i>FINTECH</i>)	61
Fajar Candraneara.....	61
A. SEJUMLAH UNDANG-UNDANG INVESTASI	62
BAB 10 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DI ERA PERDAGANGAN DIGITAL INTERNASIONAL	69
Fareska Rizano	69
A. KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM	69
B. INVESTASI DAN INVESTOR	70
C. PERDAGANGAN DIGITAL INTERNASIONAL	71
D. REGULASI DAN PERATURAN TERKAIT	71
E. PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK INVESTOR DI ERA DIGITAL: RISIKO, KEJAHATAN SIBER, DAN SOLUSI REGULASI	72
BAB 11 REMODELLING UU NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA	76
Ginara Utami Atmawisastra	76
A. HARMONISASI DALAM HUKUM INVESTASI INTERNASIONAL TERHADAP REGULASI HUKUM DI INDONESIA	77
B. KELEMAHAN UUPM DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM INVESTASI GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN IKN	80
BAB 12 PERAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM SENGKETA INVESTASI	83
Grees Ayu Alamdari.....	83
A. ARBITRASE INTERNASIONAL	84

B. PERAN ARBITRASE SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI INTERNASIONAL.....	85
C. INTERNATIONAL CENTRE FOR THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES (ICSID)	86
D. PILIHAN HUKUM DI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE INTERNASIONAL	88
BAB 13 KEPASTIAN HUKUM PENEMPATAN PLTU BATU BARA SEBAGAI KATEGORI TAKSONOMI HIJAU MENURUT HUKUM INVESTASI HIJAU (GREEN INVESTMENT)	90
Hafiz Akbarsyah Gumay.....	90
A. KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENEMPATAN PLTU BATUBARA DALAM KATEGORI TAKSONOMI HIJAU DI INDONESIA.....	92
B. PENEMPATAN PLTU BATUBARA DALAM KATEGORI TAKSONOMI HIJAU SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM INVESTASI HIJAU DAN KOMITMEN TRANSISI ENERGI BERKELANJUTAN.....	94
BAB 14 INOVASI PENDANAAN DAN TANTANGAN REGULASI PASAR MODAL DI INDONESIA.....	97
Imay Dyna Redra	97
A. KONSEP DAN MEKANISME EQUITY CROWDFUNDING SEBAGAI INOVASI PENDANAAN	98
B. PENGATURAN HUKUM EQUITY CROWDFUNDING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL.....	99
C. TANTANGAN REGULASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK.....	100
D. STUDI KASUS DAN ANALISIS.....	101
E. PROSPEK DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	102
BAB 15 KEBIJAKAN DORMANT TERHADAP NASABAH BANK MENURUT HUKUM INVESTASI.....	104
Indra Rathana.....	104
A. PPAK (PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN)	104
B. DANA <i>DORMANT</i> DALAM PERSPEKTIF INVESTASI.....	107
BAB 16 PERAN PLUD DAN PERBANDINGAN REGULASI INTERNASIONAL.....	112
Izaz Alhady	112

A. KONSEP DAN MEKANISME EQUITY CROWDFUNDING	113
B. LANDASAN HUKUM DAN POSISI DALAM SISTEM HUKUM INVESTASI.....	115
C. PERAN PLUD (PENYELENGGARA LAYANAN URUN DANA).....	116
D. STUDI KASUS: BIZHARE DAN SANTARA.....	117
E. PERBANDINGAN REGULASI INTERNASIONAL.....	119
BAB 17 PERAN DAN FUNGSI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM SISTEM INVESTASI NASIONAL.....	121
Kartiyah	121
BAB 18 PERAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASTI SERTA PERLINDUNGAN INVESTOR DI INDONESIA.....	128
Khadaifi Alfiqri.....	128
A. MEKANISME ARBITRASE INTERNASIONAL DI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING DI INDONESIA.....	130
B. PERAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR DI INDONESIA.....	132
BAB 19 INVESTASI SYARIAH DALAM TANTANGAN REGULASI DI INDONESIA.....	135
Mahdiyyah Hayya Az-zahra.....	135
A. PENGERTIAN INVESTASI SYARIAH DALAM TANTANGAN REGULASI DI INDONESIA	136
B. SEJARAH INVESTASI SYARIAH DALAM TANTANGAN REGULASI DI INDONESIA	137
C. KERANGKA HUKUM INVESTASI DI IDNONESIA SERTA INVESTASI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI.....	138
D. PERAN LEMBAGA KEUANGAN DAN OTORITAS DALAM INVESTASI SYARIAH DALAM TANTANGAN REGULASI DI INDONESIA.....	138
E. REGULASI DAN MASA DEPAN INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA	139
F. TANTANGAN INVESTASI SYARIAH DI DALAM REGULASI INDONESIA	140

BAB 19 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP NASIONALISASI PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA MASA DEPAN	142
Nuradi, S.H.....	142
A. TEORI HUKUM INVESTASI INTERNASIONAL	144
B. TEORI KEDAULATAN EKONOMI NEGARA	144
C. TEORI HUKUM DAN JUGA PEMBANGUNAN (LAW AND DEVELOPMENT)	145
D. KONSEP NASIONALISASI DAN EKSPROPRIASI.....	145
E. KONSEP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENANAMAN MODAL.....	146
F. KONSEP PROYEKSI HUKUM INVESTASI MASA DEPAN.....	146
G. LANDASAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL	146
H. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DAN POTENSI NASIONALISASI DI MASA DEPAN	150
I. ANALISIS KRITIS DAN PROSPEK MASA DEPAN.....	153
BAB 20 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PAJAK CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA ..	156
Renata Putri	156
A. PERKEMBANGAN <i>CRYPTOCURRENCY</i> DI INDONESIA.....	156
B. KERANGKA HUKUM DAN REGULASI <i>CRYPTOCURRENCY</i>.....	158
C. MANAJEMEN RISIKO DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN <i>CRYPTOCURRENCY</i>.....	159
D. ASPEK PERPAJAKAN ATAS <i>CRYPTOCURRENCY</i> DI NEGARA INDONESIA	160
E. PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PAJAK <i>CRYPTOCURRENCY</i> DI INDONESIA	161
F. PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR <i>CRYPTOCURRENCY</i> DI INDONESIA	162
G. TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK <i>CRYPTOCURRENCY</i> DI INDONESIA	163
BAB 21 PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM INVESTASI ASEAN	165
Sandi Pradeka Rachmat	165
A. HUKUM INVESTASI DI NEGARA-NEGARA ASEAN	166

B. INSTRUMEN PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR DAN PENYELESAIAN SENGKETA.....	168
C. EVALUASI DAN PROSPEK HARMONISASI PERLINDUNGAN HUKUM INVESTASI ASEAN.....	170
BAB 22 PENERAPAN DUE DILIGENCE LINGKUNGAN DALAM INVESTASI PROYEK INFRASTRUKTUR.....	173
Setiawan Jodi Fakhur	173
A. PENERAPAN DUE DILIGENCE LINGKUNGAN DALAM PROYEK INFRASTRUKTUR.....	174
B. EFEKTIVITAS <i>DUE DILIGENCE</i> DALAM MENCEGAH DAMPAK LINGKUNGAN	175
BAB 23 KEPASTIAN HUKUM INVESTASI DALAM PERSPEKTIF GENDER..	177
Wentri Merdiani.....	177
A. PENGERTIAN MENURUT DOKTRIN DAN TEORI HUKUM	179
B. KONSTRUKSI GENDER DALAM HUKUM INVESTASI.....	179
C. IMPLEMENTASI KEPASTIAN HUKUM GENDER DALAM SEKTOR INVESTASI.....	180
D. REKONSTRUKSI KEPASTIAN HUKUM BERBASIS PERSPEKTIF GENDER.....	181
BAB 24 ASPEK HUKUM LINGKUNGAN DALAM PROYEK INVESTASI.....	184
Wisnu Rahadian	184
A. KERANGKA HUKUM LINGKUNGAN DI DALAM PROYEK INVESTASI.....	185
BAB 25 HARMONISASI HUKUM INVESTASI INDONESIA DENGAN STANDAR INTERNASIONAL.....	191
Zissi Maharesy	191
A. PENGERTIAN DAN JUGA KONSEP HARMONISASI HUKUM INVESTASI.....	192
B. STANDAR INTERNASIONAL DALAM HUKUM INVESTASI.....	193
C. UPAYA HARMONISASI HUKUM INVESTASI INDONESIA.....	195
DAFTAR PUSTAKA.....	198

DINAMIKA HUKUM INVESTASI DI INDONESIA

Buku ini menyajikan kumpulan tulisan yang membahas berbagai aspek hukum investasi di Indonesia dengan pendekatan kritis dan analitis. Berfokus pada isu-isu terkini, buku ini mengeksplorasi regulasi investasi hijau, perlindungan hukum bagi investor, serta tantangan yang dihadapi dalam era digital. Setiap penulis menawarkan pandangan yang mendalam tentang dinamika hukum investasi, termasuk pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam praktik investasi, buku ini menekankan perlunya regulasi yang adil dan transparan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, buku ini juga membahas kebijakan pajak terkait cryptocurrency dan tantangan yang muncul dalam regulasi teknologi finansial. Ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi akademis, tetapi juga sebagai sumber wawasan praktis bagi pelaku industri, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum yang tertarik dengan dunia investasi. Di tengah perubahan yang terus berlangsung, buku ini hadir sebagai panduan dalam memahami hukum investasi di Indonesia.

Penerbit
Greenbook Publishing Indonesia
Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.12, Kedungjaya,
Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat 45611
www.greenbook.id



Akun Instagram
Greenbook.id



Akun TIKTOK

sahabatgreenbook.id

ISBN 978-634-7542-11-3



9

786347

542113